

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmasasmita, Romli, 1998, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Bandung.
- Alifia, 2008. *Apa Itu Narkotika dan Napza*, PT Bengawan Ilmu, Semaranghg.
- Arief, Barda Nawawi, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Jakarta, Laskar Aksara
- Darmodiharjo, Dardji dan Sudharto, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadjon, M Phillipus, 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, , Surabaya.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge
- Manuel G. Velasquez, 2005, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Alih Bahasa Ana Purwaningsih et.al, Yogyakarta: Andi
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Moedjono, 1994. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan Penerbitan FKIS, Yogyakarta.
- Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International Review*, London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raymond Wacks, 1995. *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.
- Soedarto, 1994, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran, Bandung

Sumaryono, E. 2002, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta

Tom Campbell, 1994. Tujuh Teori Sosiologi (Sketsa, Penilaian, Perbandingan) diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta.

Yahya, M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,

Yvond Dandurand, 2010. *A Review of Selected Witness Protection Programs*, dipersiapkan untuk Research and National Coordination Organised Crime Divison Law Enforcement and Policy Baranch Public Safety Canada, Department of Public Safety, Ottawa.

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.13 Tahun 2006

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, op.cit.*, Pasal 1 butir 3

JURNAL/MAKALAH

Badan Narkotika Nasional, “Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2017,” *Majalah Bulanan BNN*, 2018

Darurat Narkoba”, harian *Kompas*, edisi 11 Februari 2018.

“*Justice collaborator* perlu perlindungan istimewa”, *Tempo*, edisi 12 Desember 2017.

Satuan Tugas Pemberantasan Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang*

Bekerjasama (justice Collabolators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan saksi, Korban, (Jakarta: Satgas Mafia Hukum, 2011), hlm. 3

Mas Achmad Santosa, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*)”, (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as *Justice collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4 November 2011)

United Nations Office on Drugs and Crime, dalam <http://wikipedia.org>

Dina Siegel, “Secrecy, Betrayal and Crime”, *Utrecht Law Review Volume 7, Issues 3 October 2011*

United Nations, *Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Sri Rejeki, “Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja”, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: <http://download.portalgaruda.org/article.php>

Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2016), url: <https://media.neliti.com>

Wagimin Wira Wijaya, *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen* volume II/ Agustus 2005 No. 07. url: <https://media.neliti.com>